

MERDEKA BELAJAR EPISODE KEDUA BELAS

Sekolah Aman Berbelanja Bersama SIPLah

26 Agustus 2021

Merdeka Belajar Episode Kedua Belas: Sekolah Aman Berbelanja dengan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) diluncurkan untuk meningkatkan kemudahan dan keamanan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) oleh sekolah menggunakan sumber dana bantuan pemerintah.

Pada tahun 2021, pemerintah menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp53,4 triliun ke lebih dari 216 ribu sekolah untuk membantu pemenuhan kebutuhan belanja operasional. Total anggaran BOS meningkat dari Rp51,2 triliun di tahun 2019 menjadi Rp53,4 triliun di tahun 2021. Sejak diinisiasi pada tahun 2019, SIPLah telah membantu satuan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Pada 26 Agustus 2021, penyempurnaan fitur SIPLah diluncurkan sebagai Merdeka Belajar episode kedua belas.

SIPLah bertransformasi untuk menyediakan pengalaman berbelanja dan berjualan yang lebih baik. Kini sekolah dapat berbelanja dengan semakin aman sebab alur pembelanjaan dijamin sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa oleh Satuan Pendidikan. Selain itu, transformasi ini juga menghadirkan lebih banyak pilihan mitra penyedia dan mitra pengiriman. Fitur-fitur yang tersedia juga lebih lengkap, yang terdiri dari pembatalan transaksi, aduan, serta dasbor pemantauan status transaksi untuk menghindari kesalahan maupun penipuan.

Penyempurnaan fitur SIPLah membantu sekolah membelanjakan dana BOS secara fleksibel sesuai kebutuhan sekolah, termasuk untuk melengkapi daftar periksa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas yang diatur di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri. Selain itu, pembaruan ini juga membantu proses pelaporan karena semua proses transaksi terdokumentasi dengan baik. Pendokumentasian elektronik untuk setiap transaksi mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses PBJ. Hal ini meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dengan tingkat harga keseluruhan cenderung lebih rendah.

Di samping itu, penyempurnaan fitur SIPLah juga membuka kesempatan bagi lebih banyak pelaku UMKM di daerah untuk ikut bergabung sebagai penyedia barang dan jasa.

Sejauh ini, telah tercatat lebih dari 1 juta transaksi yang dilakukan melalui SIPLah, dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp12,6 triliun dan melibatkan 26.025 penyedia barang dan jasa. Dengan capaian tersebut, Kemendikbudristek meraih dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Untuk periode 2021-2023, 18 dari total 61 mitra pasar yang mendaftar sebagai penyedia barang dan jasa dinyatakan lolos persyaratan administrasi dan uji teknologi melalui sayembara terbuka.